

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Riau sebesar 4,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,54. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 6,55 persen dengan IHK sebesar 109,03 dan terendah terjadi di Kota Pekanbaru sebesar 3,39 persen dengan IHK sebesar 106,83. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,56 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,88 persen; kelompok transportasi sebesar 2,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,74 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,55 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,85 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,58 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen. Di sisi lain kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,07 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Riau bulan Mei 2024 masing-masing sebesar 0,30 persen dan 1,78 persen.

1. Berdasarkan hasil pantauan barang kebutuhan pokok selama tahun 2024 ada beberapa komoditi yang mengalami fluktuasi harga. Berikut hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar tradisional Datuk Rubiah
 - Cabe merah keriting pada Triwulan II pada akhir bulan april turun sekitar 27,27 persen dikarenakan stok cabe merah keriting memenuhi persediaan pasar dan pada bulan mei kembali naik sekitar sampai awal juni sekitar 30% dan naik kembali diakhir bulan juni menjadi disebabkan stok bahan ketersediaan yang sudah mulai berkurang pendistribusiannya sehingga menyebabkan kenaikan harga.
 - Cabe rawit merah pada triwulan II bulan april sampai dengan bulan juni naik begitu signifikan 45,45% dari mengalami kenaikan harga disebabkan ketersediaan bahan yang tidak sesuai dengan tingginya permintaan dan kurangnya stok ketersediaan cabe rawit merah sehingga menyebabkan tingginya harga modal agen/distributor dikarenakan stok cabe rawit belum memenuhi tinggi nya permintaan.
 - Cabe rawit hijau juga mengalami kenaikan sekitar 28,57 persen disebabkan kurangnya ketersediaan bahan berkurangnya pendistribusian kedaerah sehingga menyebabkan tingginya harga pasar.
 - Bawang merah pada triwulan II mengalami penurunan sekitar 11.11% karena stok masih ada dan memenuhi permintaan

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Cabe merah keriting pada pada akhir dibulan april turun dari harga 55.000/kg turun menjadi 40.000/kg dikarenakan stok cabe merah keriting memenuhi persediaan pasar dan pada bulan mei kembali naik sekitar sampai awal juni dari harga 40.000/kg naik menjadi 52.000/kg dan naik kembali diakhir bulan juni menjadi 55.000/kg disebabkan stok bahan ketersediaan yang sudah mulai berkurang pendistribusiannya sehingga menyebabkan kenaikan harga.
- Cabe rawit merah pada bulan april sampai dengan bulan juni naik begitu signifikan dari harga 55.000/kg menjadi 80.000/kg mengalami kenaikan harga disebabkan

ketersediaan bahan yang tidak sesuai dengan tingginya permintaan dan kurangnya stok ketersediaan cabe rawit merah sehingga menyebabkan tingginya harga modal agen/distributor. Diakhir bulan juni kembali turun menjadi 75.000/kg dikarena stok cabe rawit belum memenuhi tinggi nya permintaan.

- Cabe rawit hijau juga mengalami kenaikan dari harga 35.000/kg naik menjadi 46.000/kg disebabkan kurangnya ketersediaan bahan berkurangnya pendistribusian kedaerah sehingga menyebabkan tingginya harga pasar.
- Bawang merah pada triwulan II justru mengalami penurunan dari harga 54.000/kg turun menjado 48.000/kg karena stok masih stabil dan memenuhi permintaan

Permasalahan dalam pengendalian inflasi Daerah:

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sebahagian besar masih tergantung kepada daerah pemasok, yaitu antara lain dipasok dari, Sumatera Utara dan daerah lainnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Optimalisasi koordinasi pengendalian inflasi, melalui rapat-rapat bersama Tim TPID dengan melibatkan pihak-pihak stakeholder terkait.
- Mengalokasikan anggaran melalui kegiatan pada OPD terkait dalam rangka peningkatan produksi pangan strategis, untuk mengurangi ketergantungan dari daerah pemasok serta untuk mendukung ketersediaan pangan di
- Melakukan monitoring harga pangan strategis secara harian untuk mengetahui perkembangan harga di lapangan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam rangka stabilisasi harga
- Memberikan bantuan kepada para petani, pembudidaya ikan, para pelaku UMKM subsidi pasar
- Melaksanakan Kerjasama dengan disprindagsar dan Bulog (Mou)
- Pembangunan Rice Milling Unit (RMU) dan lumbung pangan masyarakat - Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (PP2B) untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan.
- Digitalisasi pertanian (Climate Station, Rapid Soil Cek).
- Melaksanakan kegiatan cadangan pangan pemerintah daerah - Pembangunan saluran air dan jalan usaha tani dan berkelanjutan
- Melaksanakan operasi pasar dibeberapa kecamatan
- Membuka TPK untuk mengatasi inflasi yang sudah tersebar dikecamatan yang mana dalam pengawasan Disprindagsar.
- Memantau Bapokting di Kabupaten dan Kecamatan untuk sebagai bahan pertimbangan sehingga dapat perbandingan baik di Kecamatan maupun Kabupaten letak kelemahan dan kekuatannya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Rokan Hilir pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka membangun sinergi pelaksanaan pengendalian inflasi, maka perlu terus meningkatkan koordinasi antar OPD dan pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian

Perlunya selalu meningkatkan koordinasi antara TPID Kabupaten Rokan Hilir dengan

2. TPID Kabupaten provinsi tetangga dalam rangka penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas atau berada di luar Kabupaten Rokan Hilir;
3. Melestarikan Program Unggulan TPID Rokan Hilir di seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hilir secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan jumlah luasan tanaman padi yang menerapkan Teknologi IPAD-BO di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sehingga masing-masing wilayah dapat mewujudkan kemandirian pangan, dengan demikian inflasi di daerah dapat terkendali.
4. Kegiatan pasar murah berdampak positive di masyarakat yang merupakan upaya untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau
5. Pelaksanaan operasi pasar berpengaruh terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, harga stabil dan keberadaan bahan kebutuhan pokok tersedia di pasar sehingga perekonomian masyarakat meningkat

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Rokan Hilir pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. OPD terkait mengalokasikan anggaran program/kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi daerah baik melalui
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Rokan Hilir agar harga barang tetap terkendali;
3. Melakukan pengawasan distribusi dan harga pupuk, pestisida dan barang bersubsidi lainnya;
4. Melaksanakan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berkoordinasi dengan Instansi Terkait apabila diperlukan upaya stabilisasi harga beras
5. Memantau dan menjaga ketersediaan stok pangan di Kabupaten Rokan Hilir secara berkala;
6. Seluruh Anggota TPID agar tetap melakukan upaya yang maksimal dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Rokan Hilir